



Wisma Atlet terlalu Elit untuk Jadi Rusun

Palmerah, Warta Kota

Legislator DKI Jakarta mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang telah mengajukan surat hibah Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara kepada pemerintah pusat.

Pengawas pemerintah daerah itu mengklaim, telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar menggunakan fasilitas tersebut untuk keperluan warga Jakarta yang terkena program relokasi.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmuda mengaku, telah meminta penggunaan wisma tersebut kepada Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono beberapa waktu lalu.

Kata dia, Menteri Basuki juga telah membahas keinginan Ida dengan meng-

gelar rapat bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno soal penggunaan aset pemerintah pusat kepada daerah.

Ida berujar, pemerintah pusat mempersilakan Pemprov DKI menggunakan fasilitas tersebut namun diawali dengan pengajuan surat secara resmi.

Hasil keputusan itu, bahkan sudah Ida sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) beberapa waktu lalu.

"Saya sudah minta langsung kepada PUPR, dan PUPR sudah rapat dengan Mensesneg terkait dengan Wisma Atlet Pademangan. Mereka-mereka mengizinkan dihibahkan ke kita untuk warga DKI

Jakarta, hanya suratnya yang memang dari kita (Pemprov DKI) belum ada," kata Ida pada Rabu (1/5/2024).

Hal itu dikatakan Ida saat menanyakan langsung soal progres hibah Wisma Atlet itu kepada Menteri Basuki. Kepada Ida, Menteri Basuki berucap bahwa Pemprov DKI tak kunjung memberikan surat permohonan penggunaan aset yang dibangun oleh kementeriannya.

"Sekarang suratnya belum sampai ke saya," ucap Ida menirukan pernyataan Menteri Basuki.

Ada pemanas air

Mendengar pernyataan Basuki, Ida lalu menanyakan hal ini kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum.

Retno lalu menjelaskan alasan

Pemprov DKI belum mengajukan surat hibah untuk penggunaan Wisma Atlet.

"Kalau masih ingat waktu itu rapat di Bappeda, saya minta Ibu Retno untuk bersurat, tapi ternyata Ibu Retno bilang bahwa itu terlalu elit kalau buat Rusun karena ada pemanas dan lain sebagainya," ujar Ida.

Menurut dia, Wisma Atlet Pademangan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara yang saat ini masih mengharapkan hunian rusun di dekat JIS.

Meski keberadaan kampung itu menyalahi aturan karena berada di atas lahan negara, tapi pemerintah harus menyiapkan hunian pengganti apalagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu menjanjikan hunian layak.

"Warga Kampung Bayam adalah warga

DKI Jakarta yang perlu...
Dia salah atau tidak karena dia menggunakan tanah PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api, kini KAI) yang sekarang ini ada dan sudah dijanjikan oleh Pak Anies sebagai Gubernur, akan diberikan tempat yang layak tapi sampai hari ini masih terlunta-lunta," tuturnya.

Meski demikian, Ida menghargai langkah Pemerintah Jakarta yang menawarkan Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara kepada warga eks Kampung Bayam.

Namun faktanya tidak semua warga eks Kampung Bayam mau direlokasi ke Rusun Nagrak, dan bersikeras mengisi Kampung Susun Bayam di dekat JIS.

"Mereka di Rusun Nagrak nggak mau, alasannya segala macam," ucap perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (faf)